



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 594 -KUM/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 476 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dimana dalam tahapan persiapan inventarisasi diamanatkan untuk membentuk tim Inventarisasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dimana Pembentukan tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27

- Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
2. Menyiapkan data Daftar BMD;
3. Menyiapkan dokumen sumber;
4. Melaksanakan Inventarisasi;
5. Melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
6. Meneliti dokumen kepemilikan;
7. Menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
8. Menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA /A.1/2.07.3.31.0.00.01.0000/001/2023
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45/ 594 -KUM/2023
 TANGGAL : 6 Maret 2023

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tanah Laut	Pembina I
2.	Wakil Bupati Tanah Laut	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Ketua
5.	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua I
7.	Pengurus Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Wakil Ketua II
8.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
9.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
10.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
11.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
12.	Kepala Balai Latihan Kerja	Anggota
13.	Instruktur Muda pada Pelatihan dan Produktifitas	Anggota
14.	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja	Anggota
15.	Mediator Hubungan Industrial Muda pada Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
16.	Pengantar Kerja Ahli Muda pada Persyaratan kerja	Anggota
17.	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
18.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
19.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Pembangunan Sumber Daya Industri Bidang Perindustrian	Anggota
20.	Kasubag Tata Usaha Balai Latihan Kerja	Anggota
21.	Pengantar Muda	Anggota

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM
22.	Instruktur Pelaksana Lanjutan	Anggota
23.	Pengadministrasian Umum	Anggota
24.	Arif Sugianoor	Anggota
25.	Arif Firmanto	Anggota
26.	Awaludin	Anggota
27.	Masfupatulailiyah	Anggota
28.	Muslih Amituddin	Anggota
29.	Hevi Ariyanti	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA